

**FILSAFAT DAN ETIKA ADMINISTRASI
DEMOKRASI DAN PERKEMBANGANNYA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI (TIK): WACANA DIGITALISASI DALAM PEMILIHAN
UMUM DI INDONESIA TAHUN 2024**

Daniah Kholda, Putu Jodhita Putri

Faculty of Administration, Public Administration, University of Indonesia, Jl. Lingkar, Pondok Cina,
Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia

Email: daniahkholda99@gmail.com, putu.jodhita@gmail.com,

Abstract

This essay seeks to examine digital democracy in the conduct of elections. Digital democracy aims to enhance political democracy and citizen participation in democratic processes. Digital democracy is an effort to implement democracy without spatial, temporal, and conditional constraints. The concept of digital democracy differs from traditional democracy, which is based on specific times, places, and conditions. The conduct of elections is one form of implementing democracy in a country, including Indonesia. The method used in composing an essay on the discourse of digitalization in the 2024 general elections employs a qualitative approach based on data and interview results published on social media. By emphasizing the perspective of participants, the research method used here differs from the rigid quantitative approach, positioning the researcher separately from the object under study. The research results indicate that, based on data from the Central Statistics Agency, individuals are considered part of Generation Z if they were born between 1997 and 2012. According to the population census, 27.94 percent of Indonesia's population is dominated by Generation Z, which actively operates social media. Data from the Central Statistics Agency is also supported by the Indonesian Internet Service Providers Association data in 2020, revealing that approximately 170 million Indonesians are actively using social media. This data also mentions that, on average, Indonesian society spends 3 hours and 14 minutes on social media. Therefore, the digitalization of elections can strengthen various aspects of democracy in Indonesia. With increased transparency and accountability through technology, the public can have greater trust in the integrity of the electoral process. Easier access to information can also enhance citizen participation in the democratic process, reinforcing the representative essence of elections. However, to uphold the essence of democracy, it is crucial to ensure that every step of digitalization adheres to principles of inclusivity and fairness, preventing the marginalization of any group. Data and technology security are also essential to thwart potential threats to the integrity of democratic processes. Thus, electoral digitalization in Indonesia can serve as an instrument that enriches and fortifies democracy while preserving the core values of participation and fairness.

Keywords: Information Technology and Communication, Digitalization, Elections, Democracy, Politics

Abstrak

Esai ini berusaha untuk mengamati demokrasi digital dalam penyelenggaraan pemilu. Demokrasi digital bertujuan untuk meningkatkan demokrasi politik dan partisipasi warga dalam berdemokrasi. Demokrasi digital merupakan upaya untuk menjalankan demokrasi tanpa batas ruang, waktu dan kondisi. Konsep dari demokrasi digital berbeda dengan demokrasi tradisional yang didasarkan pada waktu, tempat dan kondisi tertentu. Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi di suatu negara, termasuk Indonesia. Metode yang kami gunakan dalam menyusun esai mengenai wacana digitalisasi dalam pemilihan umum 2024 menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan data-data dan hasil wawancara yang telah terpublikasi di sosial media. Dengan mengedepankan perspektif dari partisipan hasil dari metode penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif yang baku, peneliti disini diposisikan terpisah dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dikatakan generasi Z apabila lahir di rentang tahun 1997 sampai dengan 2012 yang berdasarkan hasil sensus penduduk sebanyak 27,94 persen penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z yang aktif mengoperasikan sosial media. Data dari BPS juga didukung dengan Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2020 yang mengungkapkan ada sekitar 170.000.000 penduduk Indonesia yang aktif menggunakan sosial media, data ini juga menyebutkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya selama 3 jam 14 menit untuk bersosial media. Oleh sebab itu, adanya digitalisasi pemilu ini dapat memperkuat aspek-aspek demokrasi di Indonesia. Dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui teknologi, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap integritas pemilu. Akses informasi yang lebih mudah juga dapat meningkatkan partisipasi warga dalam proses demokrasi, memperkuat esensi representatif dari pemilihan. Namun, demi menjaga esensi demokrasi, perlu memastikan bahwa setiap langkah digitalisasi juga memperhatikan prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan, sehingga tidak ada kelompok yang

terpinggirkan. Keamanan data dan teknologi juga penting untuk mencegah potensi ancaman terhadap integritas proses demokratis. Sehingga, digitalisasi pemilu di Indonesia dapat menjadi instrumen yang memperkaya dan memperkuat demokrasi dengan tetap menjaga nilai-nilai inti partisipatif dan adil.

Kata kunci: Teknologi Informasi dan Komunikasi, Digitalisasi, Pemilu, Demokrasi, Politik

Pendahuluan

Topik pembahasan dalam essay mengenai demokrasi dan perkembangannya dengan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dengan satu pertanyaan, bagaimana internet, teknologi dan komunikasi dapat memengaruhi demokrasi? Demokrasi digital adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di semua jenis media baik internet maupun telepon digital dengan tujuan untuk meningkatkan demokrasi politik dan partisipasi warga negara dalam berdemokrasi. Demokrasi digital merupakan upaya untuk menjalankan demokrasi tanpa batas ruang, waktu dan kondisi. Konsep dari demokrasi digital berbeda dengan demokrasi tradisional yang didasarkan pada waktu, tempat dan kondisi tertentu. Praktik demokrasi digital berhasil jika menggabungkan dunia maya/virtual dan organik atau dengan menyatupadukan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan kondisi secara realitas atau tatap muka. TIK dapat mendorong proses demokrasi seperti menurut pendapat dari John Keane bahwa komunikasi demokrasi dapat memberikan dampak positif terhadap sistem politik demokrasi. Pengguna TIK dalam proses demokrasi dapat mengumpulkan dokumen tentang politik dan pemerintahan dengan lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya. Pemungutan suara, kontribusi kampanye dan posisi kebijakan juga menjadi lebih mudah jika dilaksanakan secara digital.

Digitalisasi merupakan salah satu perubahan besar dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan, serta melangsungkan interaksi sosial. Interaksi sosial berkembang melalui internet terutama dalam aspek kehidupan sosial dan politik yang bertransformasi menjadi digitalisasi. Perkembangan ini ada saat melakukan pemilihan umum. Saat sebelum diselenggarakannya pemilihan umum, kebanyakan paslon melakukan kampanye politik melalui media sosial. Kampanye politik melalui media sosial kian menguat, ruang digital dianggap mampu melahirkan persaingan politik dan menggiring opini dari masyarakat. Proses digitalisasi pemilu di Indonesia tetap mengacu pada Undang-Undang yang membahas mengenai pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum dilaksanakan serentak dalam satu hari. Digitalisasi dalam pemilihan umum dapat menghemat penggunaan kertas, selain itu *smartphone* dapat mendukung penyelenggaraan pemilu dengan lebih mudah. Dengan menerapkan metode digitalisasi dalam pengumpulan data pemilih, pengambilan, perhitungan suara serta rekapitulasi hasil dari penghitungan suara dapat memudahkan dan mempercepat hasil penghitungan suara. Digitalisasi dalam berdemokrasi dapat terlaksana apabila regulasi diubah dalam rangka penerapan digitalisasi pemilu di tahun 2024 sehingga digitalisasi dalam pemilihan umum dapat terwujud.

Tinjauan Teoritis

Manusia telah terlibat dalam proses komunikasi sejak zaman prasejarah, dimana komunikasi dilakukan melalui tulisan-tulisan pada dinding gua untuk menyebarkan informasi. Meskipun teknologi informasi terus berkembang hingga saat ini, bentuk penyampaian informasi telah menjadi lebih modern. Saat ini, media sosial menjadi sarana utama untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Dengan demikian, perkembangan manusia sejalan dengan perubahan dalam cara menyampaikan informasi, yang dikenal sebagai teknologi informasi.

McKeown dalam Suyanto (2005:10) mendefinisikan teknologi informasi sebagai seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan

menggunakan informasi dalam berbagai bentuknya. Teori lain, seperti yang disampaikan oleh Williams dalam Suyanto (2005:10), menyebutkan bahwa teknologi informasi mencakup berbagai teknologi yang membantu dalam menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan/atau menyampaikan informasi. Pendekatan lain dari Behan dan Holme dalam Munir (2009:31) menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi melibatkan segala hal yang mendukung pencatatan, penyimpanan, pengolahan, pengambilan, pengiriman, dan penerimaan informasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pemilu diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan menjadi lembaga demokrasi. Dalam konteks teoritis, pemilihan umum dianggap sebagai tahap awal dalam serangkaian proses kehidupan tata negara yang demokratis. Dengan demikian, pemilu berperan sebagai motor penggerak dalam mekanisme sistem politik Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang kami gunakan dalam menyusun esai mengenai wacana digitalisasi dalam pemilihan umum 2024 menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan data-data dan hasil wawancara yang telah terpublikasi di sosial media. Pendekatan kualitatif menerapkan cara berpikir induksi dari empiris ke rasional sehingga pembahasan yang akan kami paparkan dituliskan berdasarkan data dan informasi yang ada. Dengan mengedepankan perspektif dari partisipan (individu) hasil dari metode penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif yang baku. Kami melakukan pengumpulan data menggunakan prinsip *fenomenologis* yakni dapat memahami suatu gejala dan fenomena yang dihadapi secara mendalam oleh manusia berdasarkan pengalaman subjektif atau dari sudut pandang individu/kelompok. Peneliti disini diposisikan terpisah dengan objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif dirasa cocok digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah secara mendalam serta memungkinkan kami untuk menelusuri berita dan memeriksa data-data terkait Wacana Digitalisasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2024.

Hasil Penelitian

Legitimasi yang kuat akan melahirkan demokrasi dengan kualitas baik. Demokrasi yang baik terlihat dari keaktifan partisipasi dari rakyatnya. Partisipasi rakyat salah satunya dapat dilihat dari keterlibatannya dalam melakukan pemilihan umum. Konteks demografi tidak terlepas dari skema tinggi rendahnya partisipasi rakyat, karena kelompok anak muda khususnya generasi Z memiliki peran dalam menentukan tinggi rendahnya partisipasi dalam pemilihan umum.

Menurut Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran Program Konektivitas Digital di tahun 2021 beliau berpendapat bahwa perubahan dari arah konvensional ke arah digitalisasi merupakan solusi yang dinilai strategis dan tepat untuk membawa Indonesia menuju perubahan masa depan. Namun, Indonesia juga dituntut akan untuk menciptakan akan kedaulatan dan kemandirian digital. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dikatakan generasi Z apabila lahir di rentang tahun 1997 sampai dengan 2012 yang berdasarkan hasil sensus penduduk sebanyak 27,94 persen penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z yang aktif mengoperasikan sosial media. Data dari BPS juga didukung dengan Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2020 yang mengungkapkan ada sekitar 170.000.000 penduduk Indonesia yang aktif menggunakan sosial media, data ini juga

menyebutkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya selama 3 jam 14 menit untuk bersosial media.

Dari jabaran data diatas mengungkapkan sebuah fakta bahwa pengguna media sosial didominasi oleh Generasi Z yang mana pada 2024, generasi ini merupakan salah satu generasi yang menjadi pemilih terbesar dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini merupakan sebuah fakta akan realitas dinamika sosial Indonesia yang tidak boleh lepas dalam peranan demokrasi di Indonesia.

Pembahasan

Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

I. Kontribusi TIK dalam Konteks Demokrasi

Peran yang signifikan muncul dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Fenomena peningkatan pengguna internet dari tahun 2013 hingga 2018 mencerminkan bahwa masyarakat tidak lagi terlepas dari pengaruh teknologi informasi. Salah satu kontribusi utama TIK dalam konteks demokrasi adalah melalui peningkatan akses informasi. Dengan adanya internet, warga dapat dengan cepat mengakses berita, analisis politik, dan informasi terkini. Hal ini membuka ruang bagi lebih banyak orang untuk terlibat dalam diskusi publik, membentuk opini mereka sendiri, dan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, TIK juga memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui platform-platform media sosial dapat membantu meningkatkan partisipasi warga dan melalui platform mereka bebas untuk berbagi opini, ide, dan informasi. Pada tingkat yang lebih luas, perkembangan TIK dapat memperkaya diskusi publik dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam kebijakan publik. Masyarakat yang diberdayakan oleh TIK dapat dengan cepat merespons peristiwa penting, memobilisasi dukungan, dan membentuk opini bersama, yang pada gilirannya memperkuat esensi demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat. Selain itu, TIK juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Adanya akses yang lebih mudah terhadap data dan informasi publik melalui internet memungkinkan masyarakat untuk memonitor tindakan pemerintah secara lebih intensif. Misalnya, melalui portal online dan website yang disediakan oleh instansi pemerintah, warga dapat mengakses informasi tentang anggaran, kebijakan, dan keputusan pemerintah. Sehingga dalam hal ini, TIK berperan sebagai alat pengawasan yang efisien, membantu mencegah dan mengungkapkan kasus-kasus korupsi serta menegakkan transparansi pemerintahan yang merupakan prinsip pokok dalam demokrasi. Akan tetapi, meskipun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan kontribusi positif dalam konteks demokrasi, perlu diakui bahwa munculnya misinformasi dan disinformasi melalui media sosial menjadi ancaman serius terhadap integritas informasi. Penyebaran berita palsu dapat merusak diskusi publik, membentuk gelembung informasi yang memperkuat pandangan yang sudah ada sehingga mengisolasi masyarakat dari perspektif yang berbeda. Selain itu, penggunaan TIK yang salah dapat memicu polarisasi serta konflik dalam masyarakat. Pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan pesan provokatif atau merusak citra pihak tertentu dapat mengancam stabilitas demokrasi dengan merusak kepercayaan masyarakat pada institusi dan proses politik. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif, meningkatkan literasi digital, dan menguatkan regulasi guna mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa TIK tetap menjadi kekuatan positif dalam mendukung prinsip-prinsip demokrasi.

II. Potensi TIK untuk Meningkatkan Partisipasi Politik

Konsep demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dengan partisipasi politik. Menurut Bullock (2014), partisipasi warga dianggap sebagai komponen integral dari demokrasi yang berfungsi dengan baik. Untuk itu, peningkatan partisipasi politik masyarakat merupakan suatu hal yang penting untuk mewujudkan sistem demokrasi yang lebih baik. Dalam konteks ini, perkembangan TIK memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi dan menggalang keterlibatan warga dalam kehidupan politik. Beberapa ahli seperti Toffler, Toffler et al. (1994), Rheingold (1994), dan Dyson (1998) berpandangan bahwa teknologi informasi (TIK) membuka jendela bagi demokrasi langsung dan, pada saat yang sama, mengatasi kendala komunikasi dalam proses demokratisasi.

Selain meningkatkan akses terhadap informasi, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan warga, serta meningkatkan pengawasan publik dan transparansi pemerintah yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, TIK memiliki potensi yang lebih signifikan lagi dalam hal proses pemungutan suara dalam pemilihan umum (pemilu). Dalam proses pemungutan suara, TIK dapat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi melalui sistem pengambilan suara rakyat secara elektronik. Konsep E-Voting ini memungkinkan pemilih untuk memberikan suara melalui perangkat elektronik yang dipercaya dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manual. Selain itu, sistem informasi pemilihan, pelaporan hasil secara online, dan aplikasi pemantauan *real-time* juga dapat membawa transparansi dan akses cepat kepada pemilih dan pemantau. TIK juga dapat mendukung pendaftaran pemilih online serta memfasilitasi edukasi pemilih melalui media sosial dan aplikasi. Namun, keamanan sistem pemilihan elektronik dan perlindungan terhadap serangan siber menjadi perhatian penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam pemilihan. Dengan berhati-hati mengatasi tantangan tersebut, TIK dapat memberikan kontribusi positif terhadap demokrasi dengan meningkatkan transparansi, partisipasi, dan keterlibatan publik dalam proses politik.

Digitalisasi Pemilihan Umum

Revolusi industri 4.0 berdampak pada kecepatan digitalisasi yang turut mendorong digitalisasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Menurut data resmi Kementerian Dalam Negeri antara tahun 2013 hingga 2020, sebanyak 1.572 desa di 23 kabupaten/kota di Indonesia telah menggunakan sistem pilkada melalui e-voting. E-voting dalam pemilihan kepala desa terbukti efektif dan efisien juga mampu mengatasi masalah KTP ganda. Riset International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) menunjukkan bahwa 106 negara telah mengadopsi teknologi dalam pemilu, seperti tabulasi suara, pendaftaran dan verifikasi pemilih, dan e-voting. Beberapa negara yang menggunakan mesin e-voting untuk pemilu nasional dan lokal contohnya India, Filipina, Belgia, dan Brasil. Namun, beberapa negara telah kembali ke pemilu manual karena alasan keamanan dan kelemahan teknologi, yang berdampak pada penurunan kepercayaan pemilih. Contoh negara yang beralih dari e-voting ke pemilu manual adalah Belanda dan Jerman.

Di Indonesia, ide mengenai implementasi pemilihan elektronik atau e-voting pada Pemilu 2024 sudah menjadi topik pembicaraan di berbagai tingkatan, termasuk penyelenggara pemilu, pemerintah, DPR, partai politik, ahli, dan pemerhati demokrasi. Menurut pandangan kami, penggunaan e-voting memiliki potensi positif dalam memajukan demokrasi di Indonesia, membangun kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, meningkatkan kredibilitas hasil pemilu, dan meningkatkan efisiensi seluruh proses pemilu. Modernisasi proses pemilu bisa salah satunya dengan penerapan e-voting dengan penerapan e-voting dapat juga memperkuat demokrasi substantif dengan meningkatkan interaksi antara warga negara dan pemerintah melalui platform e-partisipasi. Melalui mekanisme digital dan berbagai platform media sosial yang sudah menjadi bagian budaya di era digital, masyarakat dapat melakukan pengawasan.

Namun, implementasi pemilu digital harus disertai juga dengan oleh langkah-langkah keamanan dan keandalan teknologi yang matang untuk mengatasi potensi kelemahan e-voting. Transparansi dan keterbukaan data harus dijamin, dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dipublikasikan melalui mekanisme digital guna menjamin kredibilitas e-voting dan membangun kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur digital di berbagai daerah dan upaya penguatan ekosistem ekonomi digital oleh pemerintah memberikan harapan bahwa digitalisasi pemilu dan demokrasi sudah dapat diimplementasikan. Dengan dasar pemikiran tersebut, kami mengusulkan agar pemilu digital dan e-voting dilaksanakan pada Pemilu dan Pilkada 2024, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan kualitas demokrasi, dan mengukuhkan tatanan kehidupan bernegara yang semakin demokratis.

Analisis Wacana Digitalisasi

I. Identifikasi Narasi dan Peran Wacana dalam Mendukung atau Menentang Digitalisasi

Adanya wacana digitalisasi dalam pemilihan umum tahun 2024 memunculkan pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak. Mengadopsi teknologi digital dalam pemilihan umum dapat mendorong keefektifitasan dalam proses pelaksanaan pemilihan, persaingan politik dan baiknya legitimasi. Penerapan Electronic Voting dan Internet Voting dicanangkan dalam rangka digitalisasi pemilihan umum tahun 2024. E-Voting merupakan singkatan dari Electronic Voting yang merupakan proses pengambilan serta perhitungan suara dengan menggunakan alat elektronik, kemudian ada I-Voting yang merupakan singkatan dari Internet Voting merupakan proses pemilihan suara dari rakyat untuk paslon dengan berbasis internet yang dapat dilakukan bebas ruang tanpa mengumpulkan pemilih dalam satu tempat. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri menyampaikan bahwa telah mencoba metode E-Voting dan I-Voting kepada beberapa desa dalam Pemilihan Kepala Desa di tahun 2021. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendukung adanya digitalisasi dalam pemilihan umum dengan pertimbangan keuntungan yang didapat ketika menggunakan metode pemilihan secara E-Voting dan I-Voting, keuntungannya antara lain yaitu; 1. Penghitungan suara lebih cepat, 2. Menghemat biaya untuk mencetak lembaran suara 3. Lebih sederhana dalam melakukan pemungutan suara 4. Dapat digunakan berulang kali aplikasi/webnya. Selain itu hal positif dari metode ini adalah dapat mengantisipasi pekerja penghitungan suara kelelahan dalam melakukan penghitungan suara dan rusak atau hilangnya surat maupun kotak suara saat distribusi ke berbagai tempat, hal ini sudah tidak relevan dilakukan di zaman dengan kemajuan teknologi yang pesat. Peluang partisipasi dari pemilih besar karena pemilih tidak perlu datang ke lokasi pemilihan, hanya menggunakan *smartphone*. Hal ini dapat membuka peluang dan ruang partisipasi yang luas dari pemilih.

Namun, disisi lain Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga mempertimbangan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur dalam penerapan pemilihan umum secara E-Voting dan I-Voting. Pertama untuk SDM, dibutuhkan SDM yang mumpuni serta melek akan teknologi untuk mampu melakukan pemilihan. Kemampuan mengoperasikan dan memahami dalam menggunakan perangkat elektronik serta internetnya. Dapat dianalisis dari angka populasi masyarakat melek teknologi di Indonesia. Dalam data yang tertera pada Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi peningkatan masyarakat dalam mengakses internet dari tahun ke tahun. Peningkatan penggunaan internet terjadi di desa maupun kota. Di daerah perkotaan, persentase penggunaan internet pada tahun 2021 sekitar 71,81 persen dan meningkat menjadi 74,16 persen pada tahun 2022, sedangkan pengguna internet di daerah pedesaan pada tahun 2021 sekitar 49,30 persen dan meningkat menjadi 55,92 persen pada tahun 2022 (data BPS). Menjadi PR untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang melek akan teknologi agar mampu mendukung pelaksanaan digitalisasi pemilihan umum di tahun 2024 mendatang. Selain

itu ketersediaan jaringan internet dan sinyal juga berpengaruh terhadap keberlangsungan pemilihan ini. Dilansir dari data BPS Tahun 2021 terdapat 15.916 desa/kelurahan di perkotaan yang mendapatkan jaringan internet telepon seluler dan 22 desa/kelurahan di perkotaan yang tidak mendapatkan jaringan internet telepon seluler. Sedangkan untuk di pedesaan terdapat 46.010 desa/kelurahan yang mendapatkan jaringan internet telepon seluler dan 3.023 yang tidak mendapatkan jaringan internet telepon seluler. Ketersediaan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia menjadi gambaran kesiapan dari Indonesia untuk menerapkan digitalisasi dalam pemilihan umum. Disinyalir penyebaran internet ke seluruh wilayah di Indonesia sedang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama pihak terkait. Konsep E-Voting/Electronic Voting dan Internet Voting menjadi solusi yang rasional bagi pemilihan umum kedepannya karena metode ini dinilai lebih efektif dan efisien dari metode sebelumnya. Hanya saja perlu perlu mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia serta infrastrukturnya dan segera diadopsi menjadi kebijakan supaya wacana digitalisasi pemilihan umum 2024 terlaksana. Indonesia juga perlu mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dalam penerapan E-Voting dan I-Voting untuk melahirkan pemerintahan yang baik kedepannya.

II. Implikasi Keamanan dan Privasi dalam Pemilihan Umum Digital

Digitalisasi berimplikasi pada ancaman dalam pemilihan umum digital. Ancaman dari pelaksanaan digitalisasi pemilihan umum salah satunya berasal dari keamanan dan privasi dari web yang akan digunakan dalam melakukan pemilihan. Banyak celah yang memungkinkan terjadinya manipulasi data dan hasil pemungutan suara. Banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab seperti hacker yang melakukan tindak kejahatan untuk membocorkan data dan keamanan dari website pemilihan umum. Website dapat diretas jika keamanannya tidak ketat. Hal inilah yang perlu dipersiapkan kedepannya untuk membangun sistem keamanan yang tidak dapat diretas. Apalagi pemilihan umum ini sakral hasilnya, hasil rekapitulasi dapat menentukan Indonesia kedepannya. Selain itu, perlu adanya perumusan suatu sistem pengawasan yang efektif dan dapat di track atau dipantau demi memastikan suara yang diberikan benar-benar dari pemilih, bukan suara gelap. Pastikan bahwa setiap pemilih memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia untuk memberikan suaranya. Hal ini memang lepas dari pengawasan karena pengambilan suara tidak dilakukan secara *on-site*. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak kecurangan.

Kesimpulan

Demokrasi digital adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di semua jenis media baik internet maupun telepon digital dengan tujuan untuk meningkatkan demokrasi politik dan partisipasi warga negara dalam berdemokrasi. Demokrasi digital merupakan upaya untuk menjalankan demokrasi tanpa batas ruang, waktu dan kondisi. Konsep dari demokrasi digital berbeda dengan demokrasi tradisional yang didasarkan pada waktu, tempat dan kondisi tertentu. Demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang populasi manusia, yang mencakup berbagai aspek seperti struktur populasi, distribusi geografis, pertumbuhan, dan karakteristik demografis lainnya seperti usia, jenis kelamin, ras, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Suatu wilayah dapat diketahui pertumbuhan penduduknya dari suatu data yang diterima dari pencatatan penduduk.

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi di suatu negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, pemilu diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu serentak pertama di Indonesia diadakan pada tahun 2019, dengan pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota parlemen (DPR, DPD, DPRD) diadakan pada waktu yang bersamaan. Pada pemilu serentak tahun 2024, pemanfaatan teknologi digital menjadi hal yang

wajib dilakukan untuk beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Pemanfaatan teknologi digital dan jejaring sosial dapat sangat bermanfaat dan dapat memudahkan penyelenggaraan pemilu, menjadikannya lebih efektif, tepat waktu, efisien dan akurat, serta meningkatkan tuntutan masyarakat akan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Pemanfaatan KPU terhadap transparansi pemilu. teknologi digital sebagai penyelenggara pemilu merupakan wujud transparansi dan keakuratan data pemilu untuk menentukan hasil pemilu menjadi lebih sah. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan proses pemilu yang transparan, akurat dan dapat dipercaya. Segala bentuk tuduhan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu dapat ditolak dan dihindari. Di sisi lain, penggunaan berbagai platform media sosial secara efektif meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagai sarana pendidikan politik, dan meningkatkan laju partisipasi masyarakat dalam pemilu

Adanya digitalisasi pemilu ini dapat memperkuat aspek-aspek demokrasi di Indonesia. Dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui teknologi, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap integritas pemilu. Akses informasi yang lebih mudah juga dapat meningkatkan partisipasi warga dalam proses demokrasi, memperkuat esensi representatif dari pemilihan. Namun, demi menjaga esensi demokrasi, perlu memastikan bahwa setiap langkah digitalisasi juga memperhatikan prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Keamanan data dan teknologi juga penting untuk mencegah potensi ancaman terhadap integritas proses demokratis. Sehingga, digitalisasi pemilu di Indonesia dapat menjadi instrumen yang memperkaya dan memperkuat demokrasi dengan tetap menjaga nilai-nilai inti partisipatif dan adil.

Saran

Pemilu 2024 diharapkan dapat mulai mengimplementasi digitalisasi melalui e-voting, apabila dari pemerintah belum sanggup disarankan untuk menyesuaikan saja dengan pemilu yang diadakan negara di sekitar Indonesia. Pastikan setiap langkah digitalisasi pemilu memperhatikan prinsip inklusivitas dan keadilan, agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam partisipasi politik. Prioritaskan keamanan data dan teknologi dalam digitalisasi pemilu untuk melindungi data pemilih dan mencegah resiko keamanan yang dapat merusak integritas demokrasi.

Sertakan program edukasi efektif untuk masyarakat dalam langkah digitalisasi pemilu, meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi dan manfaatnya, serta melibatkan masyarakat untuk mengatasi resistensi. Terapkan sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi potensi

Permasalahan, menilai dampak perubahan, dan memastikan bahwa perkembangan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan masyarakat.

Libatkan pihak terkait seperti penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, ahli, dan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi digitalisasi pemilu, dengan konsultasi inklusif untuk memastikan kebutuhan dan perspektif semua pihak dipertimbangkan. Dengan mematuhi saran-saran ini, digitalisasi pemilu di Indonesia dapat menjadi instrumen yang memperkaya dan memperkuat demokrasi, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai partisipatif dan adil.

Daftar Referensi

Dewan Pertimbangan Presiden. 2021. Partisipasi Politik dan Digitalisasi Pemilu di Indonesia. Jakarta. (<https://www.americanprogress.org/article/protecting-democracy-online-in-2024-and-beyond/>)

KPU. 2021. Digitalisasi Pemilu dan Kedaulatan Digital. Jakarta.

- <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2021/09/MATERI-Digitalisasi-Pemilu-dan-Kedaulatan-Digital.pdf>
- Prakoso, Bayu. 2023. *Dinamika Politik Menuju Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia: Studi Social Network Analysis*. Semarang, Jawa Tengah. (https://www.researchgate.net/publication/374828461_Dinamika_Politik_Menuju_Pemilihan_Presiden_2024_di_Indonesia_Studi_Social_Network_Analysis)
- Shahi, Megan. 2023. *Protecting Democracy Online in 2024 and Beyond*. Amerika. (<https://www.americanprogress.org/article/protecting-democracy-online-in-2024-and-beyond/>)
- Arga Pribadi Imawan. 2022. *Menata Demokrasi Digital: Kesadaran Warga Negara dalam Upaya Menjaga Integritas Pemilu Era Digital*. UGM, Yogyakarta. (<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/101/158>)
- Benu Pandubrata Judasubrata. 2023. *Digitalisasi Pemilihan Umum*. BPK, Jakarta. (<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=44457>)
- Christopher Ezra Manurung; Christy Zee; Nicholas Nathanael; Ryan Ernando. 2022. *Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022*. Jakarta.
- Harmawanti Marhaeni, M.Sc. 2021. *Statistik Telekomunikasi Indonesia: Data Banyaknya Desa/Keluaran Menurut Provinsi dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler*. Jakarta. (<https://www.bps.go.id/publication>)
- Masrully. 2022. *Wacana Digitalisasi Pemilu: Seberapa Siapkan Indonesia?. Lembaga Administrasi Negara (LAN)*. Jakarta. (<https://lan.go.id>)